

## **Appendix 1**

### **Text From Jakarta Post**

#### **Datum 1**

Jokowi plays down global risks

Undeterred by rising external risks, Presiden Joko “Jokowi” Widodo unveiled on Friday an expansionary 2016 state budget proposal as he based his growth-minded economic agenda on the large-scale disbursement of regional funds and aggressive tax cuts.

In his speech, the president did not mention possible external risks next year, such as the looming US interest rate hikes. He also based his assumptions on the fact that Indonesia, which has been among the countries suffering the hardest from the financial market crises in China and Europe, would overcome external shocks without problems.

It is not the first time we have experienced such economic turbulence. We have withstood it so many times. We are optimistic that we will be able to surmount it,” Jokowi said.

Economists have called for Jokowi to prioritize stability over growth, but instead the President laid out what he called an “expansive” budget policy that would drive up growth to 5.5 percent and strengthen the rupiah to 13,400 per US dollar next year.

The robust economic expansion would be underpinned by investment, which the government assumed would grow by 7.3 percent throughout 2015. So far, moderating investment and weakening exports have served as a drag to growth, pushing down economic expansion to a six-year low of 4.7 percent in the second quarter.

## **Datum 2**

Govt to safeguard businesses

Senior law enforcers have given their word to protect entrepreneurs running their businesses in an effort to help bolster commercial activity in the nation amid an ongoing domestic economic showdown.

Coordinating political, legal and security affairs minister luhut binsar pandjaitan said on Monday that the relevant government bodies had agreed to create a business environment that was conducive to boosting Indonesia’s weak economy.

“we don’t want any more helterskelter. The government is ready to facilitate and provide security [for business people],” he said during a gathering of ceos held by the Indonesian employers association (apindo) in south Jakarta.

National police chief gen. Badrodin Haiti, Corruption Erradication commission (KPK) chairman Taufi equrachman ruki, attorney general M.Prasetyo and investment coordinating board (BKPM) head Franky Sibarani also attended the event and pledged their support in front of representatives from local and foreign business associations.

The fear of being held up in criminal allegations by the KPK or the police is said by many to be one of the prime causes of low government spending, especially for village funds,as officials are reluctant to utilize the money available and prefer to keep it secure in local bank accounts.

### **Datum 3**

Tax amnesty may only profit a few

A plan to offer an amnesty to recalcitrant taxpayers with the hope of triggering a repatriation of Indonesian assets kept overseas has strayed away from its initial intentions as the draft bill indicates that it will likely only profit a few

The finance ministry and the house of representatives earlier boasted that the planned amnesty will bring home billions of dollars in financial assets parked overseas by members of Indonesian conglomerates

However, a draft bill on the tax amnesty, a copy of which was recently obtained by the Jakarta post, includes no mention of repatriation measures nor any policy providing any incentives to lure funds back to the country

The only incentives provided are penalties of between 2 and 5 percent on tax arrears that evaders are required to pay if they report undeclared assets in a certain period of time.

Tax evaders will also be immune to possible criminal prosecution, as well as to administrative penalties on their declared assets.

## **Appendix 2**

### **Text From Media Indonesia**

#### **Datum 4**

##### **Bom Sepeda**

Pengamat terorisme menduga bom tersebut bersifat pribadi dan di luar jalur kelompok teror lama.

Kesigapan jajaran kepolisian benar benar diuji dalam sepekan terakhir. Belum selesai konflik di Tarakan, Kalimantan Timur, dan konflik antarkelompok di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, polisi kembali dibuat sibuk oleh bom berdaya ledak rendah di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, kemarin.

Bom rakitan itu meledak di pinggir Jalan Kalimalang Raya, sekitar 6 meter dari Pos Polisi Lalu Lintas Sumber Arta Duren Sawit, Jakarta Timur. Bom diledakkan tepat di belakang seorang polisi yang tengah mengatur lalu lintas pada pukul 08.15 WIB.

Pelaku, Ahmad bin Abu Ali, 35, warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, datang dari arah Jakarta dengan menuntun sepeda melalui trotoar menuju Bekasi beserta bom rakitan yang diikat di bagian depan. Itu merupakan modus baru karena biasanya bom dibawa dengan mobil, sepeda motor, atau berjalan kaki.

Kepala Unit Patroli Polres Metro Bekasi Ajun Komisaris Herry Azhari mengatakan ledakan disertai serpihan paku hanya berjarak 1 meter dari dirinya. “Pelaku yang telah berdarah berusaha kabur dengan tubuh sempoyongan. Kami tangkap dan segera amankan lokasi,” kata Herry yang tidak terluka sebab serpihan paku ukuran 4 cm dari bom rakitan tersebut hanya menempel di lengan bajunya.

Dari saku celana pelaku ditemukan dua carik kertas yang di atasnya tertera tulisan tangan dengan tinta hitam menggunakan huruf kapital. Tulisan itu berisi peringatan bernuansa balas dendam.

## **Datum 5**

Presiden Tolak Nonaktifkan Sri Mulyani

Penegak hukum akan kesulitan melakukan kerja mengusut kasus Century secara fair. TIGA pekan setelah Rapat Paripurna DPR soal Pansus Hak Angket Bank Century merekomendasikan agar mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani dinonaktifkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat bicara.

Presiden menegaskan tidak akan menonaktifkan pejabat negara yang diduga terlibat dalam skandal dana talangan Bank Century. Penonaktifan, kata Kepala Negara, harus memperhatikan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku dan diatur undang-undang.

“Aturan dan undang-undang mengatakan, apabila sudah terdakwa, yang bersangkutan akan berhenti sementara. Apabila dinyatakan bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tetap. Selama belum ada itu, asas praduga tidak bersalah harus dipegang teguh,” kata Presiden sebagaimana disampaikan kembali oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, se usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Sikap Presiden itu dinilai dua inisiator hak angket Bank Century, Maruarar Sirait (FPDIP) dan Bambang Soesatyo (F-PG), tidak bijak. “Keputusan DPR adalah keputusan politik. Presiden juga jabatan politis. Jadi, Presiden harus bijaksana

menyikapi keputusan DPR tersebut. Harus ada sikap saling menghargai,” kata Maruarar, kemarin.

Kalau Presiden tidak arif, lanjut Maruarar, DPR akan melihat dinamika yang ada dan akan menindaklanjuti. Bambang Soesatyo menyatakan menghargai sikap Presiden

Yang menolak menonaktifkan Sri Mulyani. “Tapi kalau bijaksana, Presiden mestinya menonaktifkan Sri Mulyani dan menyetujui penonaktifan Boediono. Kalau tidak, penegak hukum akan kesulitan melakukan kerja mengusut kasus ini secara fair. Belum lagi dua pejabat itu bisa menggunakan kekuasaan mereka mengancam posisi penegak hukum.”

Rapat digelar Presiden untuk meminta saran kepada sejumlah menteri guna menyikapi hasil rekomendasi Rapat Paripurna DPR soal Pansus Angket Century. Rapat juga menghasilkan dua opsi menangani kasus nasabah Antaboga.

Dalam rapat paripurna 3 Maret 2010, DPR memang meminta para pejabat yang diduga terlibat dalam skandal Bank Century untuk dinonaktifkan sehingga memudahkan proses pemeriksaan. Dua dari sejumlah nama pejabat yang menjadi sorotan luas adalah Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.



## **Datum 6**

Presiden Lempar Bola Panas Century

Jika DPR setuju pengembalian dana nasabah Century melalui APBN,

Presiden yang mendapat poin. Bila menolak, DPR yang dicerca

BELUM ada tanda-tanda kasus Bank Century segera berakhir. Pemerintah dan DPR seolah tarik tambang dan mengukur kekuatan masing-masing. Meski DPR merekomendasikan sejumlah hal untuk dilaksanakan pemerintah, Presiden malah mengembalikannya lagi ke dewan.

Dalam rapat yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah Menteri pada Senin (22/3), Presiden memutuskan sejumlah hal penting. Dua di antaranya, pertama, Presiden tidak menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani seperti permintaan DPR. Kedua, penyelesaian dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas dilakukan melalui dua opsi. Yakni menggunakan dana APBN yang harus disetujui DPR dan menggunakan aset Bank Century di dalam dan luar negeri yang masih dalam proses hukum.

Pengembalian dana nasabah memakai APBN dinilai sebagai usaha Presiden me lempar bola panas kembali ke DPR. "Kalau disetujui DPR, SBY yang mendapat poin. Tetapi jika tidak disetujui, semua akan me nuding DPR. Itulah kecerdasan politik SBY," kata

peneliti senior Lembaga Survei Indonesia Burhanudin Muhtadi kemarin di Jakarta. Sulit bagi DPR untuk tidak menyetujui karena opsi itu sudah dilemparkan ke public dan kata putus diserahkan kepada mereka.

Opsi pengembalian dana nasabah menggunakan APBN juga ditentang Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI Maswadi Rauf. Jangan sampai beban kesalahan pengelolaan Bank Century dilimpahkan lagi menjadi beban negara setelah pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun ke bank itu beberapa waktu lalu. “Bank Century harus mencari dana sendiri untuk membayar dana nasabah Antaboga Karena itu menjadi tanggung jawab mereka.” Nasabah Antaboga juga keberatan dana mereka Rp1,37 triliun dikembalikan melalui kedua opsi itu. Alasannya, APBN tidak berurusan dengan dana nasabah PT Antaboga. Siput L, Koordinator Forum Nasabah Korban Bank Century dan Antaboga, mengatakan opsi yang tepat adalah pemerintah memerintahkan Lembaga Penjamin Simpanan membayar konsumen Bank Century dan nasabah Antaboga. “Tidak ada dasarnya menggunakan APBN,” kata Siput.

### Appendix 3



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia  
Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822  
E-mail: fib\_ub@ub.ac.id <http://www.fib.ub.ac.id>

---

#### **BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Nama          | : Reza Dwi Yusdiono |
| 2. NIM           | : 125110100111072   |
| 3. Program studi | : Sastra Inggris    |

4. Topik Skripsi : Critical Discourse Analysis (CDA)  
 5. Judul Skripsi : **A Contrastive Study of Superstructure in Jakarta Post and Media Indonesia**  
 6. Tanggal Mengajukan : 21 Juni 2015  
 7. Tanggal Selesai Revisi : 11 Juli 2017  
 8. Nama Pembimbing : Dra. Endang Sasanti, M.A  
 9. Keterangan Konsultasi

| No. | Tanggal          | Materi                | Pembimbing | Paraf |
|-----|------------------|-----------------------|------------|-------|
| 1.  | 21 Juni 2015     | Pengajuan Judul       | Pembimbing |       |
| 2.  | 23 Oktober 2015  | Konsultasi Bab I      | Pembimbing |       |
| 3.  | 25 November 2015 | Revisi Bab I          | Pembimbing |       |
| 4.  | 22 Januari 2015  | Konsultasi Bab II     | Pembimbing |       |
| 5.  | 25 Januari 2015  | Konsultasi Bab III    | Pembimbing |       |
| 6.  | 26 Juli 2015     | Revisi Bab II dan III | Pembimbing |       |
| 7.  | 10 Desember 2016 | Seminar Proposal      | Pembimbing |       |
| 8.  | 10 Januari 2017  | Konsultasi Bab IV     | Pembimbing |       |
| 9.  | 3 Juni 2017      | ACC Seminar Hasil     | Pembimbing |       |
| 10. | 8 Juni 2017      | Seminar Hasil         | Pembimbing |       |

|     |              |                                            |            |  |
|-----|--------------|--------------------------------------------|------------|--|
| 11. | 13 Juni 2017 | Penyerahan Revisi<br>Setelah Seminar Hasil | Pembimbing |  |
| 12. | 5 Juli 2017  | Ujian Skripsi                              | Pembimbing |  |
| 13. | 12 Juli 2017 | ACC Penjilidan                             | Pembimbing |  |

10. Telah dievaluasi dan diuji dengan nilai:

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Malang, 10 Juli 2017  
Dosen Pembimbing

Ismatul Khasanah, M.Ed., Ph.D.  
NIP. 19750518 200501 2 001

Dra. Endang Sasanti, M.A.  
NIP. 19510624197903 2 002